

## **ANALISIS KETIMPANGAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA**

### *Analyze the Level of Regional Inequality in North Sulawesi Province*

**Reno Raven Derek, Olly Esry Laoh, dan Sherly Jocom**

**Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi**

#### **ABSTRACT**

*The aim of this study was to analyze the level of inequality in regencies / cities in North Sulawesi Province and to analyze the factors that influenced regional disparities that occur in regencies / cities in North Sulawesi Province. Research used secondary data. Data were collected and obtained from the Central Statistics Agency of North Sulawesi Province and related Government Agencies for the period of 2013 to 2017 in the form of GRDP, population, economic potential, and various other secondary data. The data obtained were grouped and processed using the MS Excel application. Method of data analysis was the Williamson Index Method, which was a method of measuring regional inequality. The results showed that North Sulawesi Province experienced low inequality in 2013 to 2016 and high inequality in 2017 with a value of 0.55. Factors affecting North Sulawesi's regional inequality were the concentration of regional economic activity, investment allocation, low levels of mobility and production factors between regions, differences in the demographic conditions of the region and less smooth of trade in land, sea and air transportation. The Williamson Index in 2013-2014 was worth of 0.48, in 2015 it was worth of 0.47, in 2016 it was worth of 0.48 and in 2017 it was worth of 0.55. This showed that the inequality in North Sulawesi from 2013 to 2016 was low but in 2017 was high.*

**Keywords:** *Regional Inequality, Index Williamson*

#### **PENDAHULUAN**

##### **Latar Belakang**

Ketimpangan pembangunan antar daerah menjadi sangat penting agar tujuan dari pembangunan yakni peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi barang kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup masyarakat dapat terwujud secara bersama-sama baik pada tingkat regional maupun nasional. Disparitas secara ekonomi diartikan sebagai adanya perbedaan yang mencolok antara golongan orang kaya dan orang miskin dalam hal distribusi pendapatan, distribusi kesejahteraan, latar belakang pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat kepuasan dan kebahagiaan hidup (Adrei dan Craciun, 2014).

Setiap wilayah umumnya mempunyai masalah di dalam proses pembangunannya, ma-

salah yang paling sering muncul di dalam wilayah tersebut yang paling besar adalah masalah ketimpangan pembangunan ekonomi dan kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah satu dengan daerah lain merupakan suatu hal yang wajar, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah. (Hartono, 2008). Ketimpangan pembangunan juga dapat dilihat secara vertikal yakni perbedaan pada distribusi pendapatan serta secara horizontal yakni perbedaan antara daerah maju dan terbelakang (Sjafrizal, 2008).

Kompleksnya masalah kemiskinan membuatnya terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia khususnya di Provinsi Sulawesi Utara dan berdasarkan Tabel 1 tingkat kem-

iskinan Kabupaten / kota di Provinsi Sulawesi Utara terjadi fluktuatif dari tahun ke tahun.

Kondisi ketimpangan pendapatan yang cukup besar terjadi menimbulkan perbedaan pendapatan yang timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal. Karakteristik suatu wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi. Ketidak seragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang pada gilirannya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun pendapatan antardaerah yang terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.

Ketimpangan pendapatan dalam pendistribusiannya menyebabkan terjadi kesenjangan antar golongan pendapatan, dimana besar kecilnya pendapatan yang diterima tentu sangat berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan adanya perbedaan dalam pendistribusian pendapatan, tingkat pendapatan masyarakat akan berbeda-beda pula pengeluaran tiap keluarga, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada jumlah pendapatan masing-masing masyarakat sesuai klasifikasi pola mata pencaharian. Hal ini juga akan menjadi pijakan dalam mempertimbangkan bagaimana ketimpangan pada masyarakat atau setiap rumah tangga yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (%) Tahun 2013-2017

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Kab Bolaang Mongondow	6.67	5.56	5.82	6.64	6.68
Kab Minahasa	6.2	6.39	6.15	6.1	6.08
Kab Kepulauan Sangihe	5.6	5.44	6.07	6.12	5.43
Kab Kepulauan Talaud	5.2	5.18	5.22	5.29	5.11
Kab Minahasa Selatan	6.61	6.7	6.26	5.1	6.59
Kab Minahasa Utara	6.91	7.5	7.03	7.06	6.51
Kab Bolaang Mongondow Utara	7.12	6.81	5.8	6.17	6.29
Kab Kepulauan Sitaro	8.02	7.56	7.01	7.02	6.99
Kab Minahasa Tenggara	6.42	6.58	6.29	6.33	6.37
Kab Bolaang Mongondow Selatan	7.21	7.47	5.96	6.14	6.25
Kab Bolaang Mongondow Timur	6.7	7	6.5	5.6	5.72
Kota Manado	7.16	6.69	6.39	7.19	6.75
Kota Bitung	6.66	6.39	3.56	5.19	6.19
Kota Tomohon	6.86	6.38	6.31	6.17	8.85
Kotamobagu	7.06	6.7	6.52	6.63	6.17
Sulawesi Utara	6.31	6.12	6.12	6.17	6.32

Sumber: BPS SULUT Statistik Dalam Angka Tahun 2018

### Rumusan Masalah

Salah satu penyebab kesenjangan antar wilayah/daerah adalah pola pembangunan yang dilaksanakan sebelum Otonomi Daerah yang bersifat sentralistik. Sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yang terjadi selama ini, disamping telah mengakibatkan terpuruknya perekonomian nasional juga menyebabkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah. Ketimpangan tersebut menyebabkan semakin melebarnya kesenjangan antara kaya dan miskin, ketimpangan antar pulau maupun ketimpangan antar sektor ekonomi.

Berkaitan dengan hal tersebut maka pertanyaan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat ketimpangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.

### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis tingkat ketimpangan wilayah Kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Metode Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan selama tiga bulan dari bulan Juli 2018 sampai bulan Oktober 2018 di Provinsi Sulawesi Utara.

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan data Sekunder. Data tersebut dikumpulkan dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas-dinas Pemerintah lainnya yang terkait.

### Konsep Pengukuran Variabel

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data sekunder dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Data sekunder yang diperlukan meliputi: PDRB tiap kab/kota Provinsi Sulawesi Utara, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara, potensi ekonomi kab/kota di Provinsi Sulawesi Utara, serta berbagai macam data sekunder lainnya. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan dan diolah menggunakan aplikasi MS Excel.

### Metode Analisis Data

Indeks Williamson yang diperkenalkan oleh Williamson, yang merupakan metode untuk mengukur ketidakmerataan regional. Metode ini diperoleh dari perhitungan perkapita dan jumlah penduduk disuatu negara. Secara sistematis perhitungan Indeks Williamson sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i/n}}{Y}$$

Dimana:

IW = Indeks Williamson

Y<sub>i</sub> = PDRB perkapita di Kabupaten/Kota i

Y = PDRB perkapita di Provinsi

f<sub>i</sub> = Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota i

n = Jumlah penduduk di Provinsi

Indeks ketimpangan Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika ketimpangan Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Utara adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah merata. Jika ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Utara adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Daerah Penelitian

Provinsi Sulawesi Utara mempunyai batas-batas:

Utara : Laut Sulawesi Republik Filipina, dan Lautan Pasifik

Timur : Laut Maluku

Selatan : Teluk Tomini

Barat : Provinsi Gorontalo

Provinsi Sulawesi Utara terletak di jazirah utara Pulau Sulawesi dan merupakan salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa. Dua provinsi lainnya adalah Provinsi Sumatera

Utara dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dilihat dari letak geografis Provinsi Sulawesi Utara terletak pada 00LU – 30LU dan 1230BT – 1260BT.

**Kondisi Demografis Wilayah Penelitian**

Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.461.028 jiwa. Terkait dengan jumlah penduduk yang tinggi tentunya terdapat faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah tingkat atau laju pertumbuhan penduduk, besarnya laju pertumbuhan penduduk membuat penambahan jumlah penduduk semakin

meningkat. Semakin besar presentasi kenaikannya maka semakin besar jumlah penduduknya. Semakin tingginya rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun, otomatis akan meningkatkan jumlah penduduk secara pesat. Kota Manado yang merupakan ibu kota Sulawesi Utara yang memiliki penduduk paling terbesar yakni 430.133 jiwa, dilihat pada Tabel 3. Pada Tabel 3 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk paling banyak Kota Manado dengan 430.133 jiwa dan yang paling sedikit Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan jumlah 64.171.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Di Sulawesi Utara Tahun 2013-2017

Kabupaten / Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Kab Bolaang Mongondow	225.768	229.604	233.189	236.893	240.505
Kab Minahasa	322.282	325.680	329.003	332.190	335.321
Kab Kepulauan Sangihe	128.423	129.103	129.584	130.024	130.493
Kab Kepulauan Talaud	86.926	87.922	88.803	89.836	90.678
Kab Minahasa Selatan	201.668	203.317	204.983	206.603	208.013
Kab Minahasa Utara	194.869	196.419	198.084	199.498	200.985
Kab Bolaang Mongondow Utara	74.237	75.290	76.331	77.383	78.437
Kab Siau Tagulandang Biaro	65.129	65.284	65.582	65.827	65.976
Kab Minahasa Tenggara	103.129	103.818	104.536	105.163	105.714
Kab Bolaang Mongondow Selatan	60.220	61.177	62.222	63.207	64.171
Kab Bolaang Mongondow Timur	66.790	67.824	68.692	69.716	70.610
Kota Manado	420.401	423.257	425.634	427.906	430.133
Kota Bitung	198.794	202.204	205.675	208.995	212.409
Kota Tomohon	96.973	98.686	100.373	101.981	103.711
Kota Kotamobagu	114.779	117.019	119.427	121.699	123.872
<b>Sulawesi Utara</b>	<b>2.360.388</b>	<b>2.386.604</b>	<b>2.412.118</b>	<b>2.436.921</b>	<b>2.461.028</b>

Sumber: BPS SULUT Statistik Dalam Angka Tahun 2018

Indeks Williamson merupakan ukuran ketimpangan untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antar wilayah/daerah. Dasar perhitungannya dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Indeks Williamson di Sulawesi Utara tercermin dalam Tabel 3.

Tabel 3. Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013 – 2017

Tahun	Indeks Williamson	Keterangan
2013	0,48	Ketimpangan Rendah
2014	0,48	Ketimpangan Rendah
2015	0,47	Ketimpangan Rendah
2016	0,48	Ketimpangan Rendah
2017	0,55	Ketimpangan Tinggi

Sumber: Data Olahan

Indeks ketimpangan Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika ketimpangan Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Utara adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah merata. Jika ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Utara adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata.

Kondisi ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dilihat dari 6 faktor penyebab ketimpangan menurut Tulus (2001), yaitu: kesejahteraan dan tingkat pendidikan penduduk, investasi, kepadatan penduduk, laju pertumbuhan, transportasi, jumlah penduduk, tenaga medis serta sarana pendidikan dan kelompok komposisi penduduk dan sarana kesehatan. Kondisi ketimpangan pada setiap kelompok berbeda-beda, wilayah yang memiliki nilai rendah pada satu kelompok belum tentu memiliki nilai yang rendah pula pada kelompok lainnya. Pada kelompok jumlah

Tabel 4. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Utara

No	Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1.	BolMong	3.705.389,50	3.911.543,38	4.139.675,10	4.413.657,90	4.708.657,86
2.	Minahasa	2.526.528,64	8.814.214	9.352.416,0	9.917.197,4	10.520.075
3.	Kpl.Sangihe	2.163.380,2	2.281.136,1	2.419.696,0	2.560.978,0	2.707.211,5
4.	Kpl. Talaud	1.191.788,3	1.253.574,6	1.318.988,2	1.388.781,5	1.459.705,2
5.	MinSel	4.287.793,60	4.574.871,20	4.858.985,50	5.109.523,9	5.446.042,5
6.	MinUt	6.319.110,5	6.791.468,4	7.272.904,3	7.782.483,3	7.292.477,4
7.	BolMut	1.170.345	1.253.606	1.320.468,1	1.401.607,2	1.489.830,2
8.	Kpl SiTaRo	1.062.683	1.143.055	1.223.203	1.309.019	1.400.572
9.	MiTra	2.527.706,0	2.693.784,4	2.693.748,4	3.044.812,2	3.238.768,7
10.	BolSel	913.130	981.754	1.039.767,6	1.103.234,8	1.172.208,6
11.	BolTim	1.341.909,5	1.435.563,5	1.528.600,1	1.613.812,0	1.706.060,3
12.	Manado	17.419.698,0	18.584.851,8	19.773.191,56	21.194.727,08	22.624.737,19
13.	Bitung	8.229.152,25	8.755.304,69	9.064.842,85	9.537.844,85	10.128.304,46
14.	Tomohon	2.186.140,33	2.322.072,70	2.464.338,04	2.566.700,00	2.793.743,92
15.	Kotamobagu	1.632.889,1	1.742.093,2	1.855.276,1	1.979.073	2.113.465

Sumber: BPS SULUT Statistik Dalam Angka Tahun 2018

penduduk, tenaga medis serta sarana pendidikan, terdapat 11 wilayah yang tergolong memiliki nilai yang rendah pada aspek tersebut, sedikit lebih banyak dibandingkan pada kelompok kesejahteraan dan tingkat pendidikan penduduk, sedangkan pada kelompok komposisi penduduk dan sarana kesehatan hanya terdapat 6 wilayah yang tergolong memiliki nilai rendah. Hal ini membuktikan bahwa suatu daerah memiliki beragam karakteristik, dan apabila daerah tersebut tergolong kurang berkembang, bukan berarti wilayah tersebut tidak memiliki kekuatan untuk berkembang.

Konsentrasi wilayah ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Ekonomi dari daerah dengan konsentrasi ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang rendah, yang dibahas dalam Produk Domestik Regional Bruto.

Tabel 5 menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha tidak sama atau tidak merata antar kabu-

paten/kota di yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, dimana kota Manado tertinggi perhitungan rata-rata tahun 2013 sampai 2017 dalam lapangan usaha sebesar 19.919.441, dimana Kota Manado adalah pusat kegiatan pemerintahan serta perdagangan yang terbesar di Provinsi Sulawesi Utara dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, sehingga banyak tenaga kerja dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara lebih memilih bekerja di Kota Manado sesuai dengan pendidikan mereka. Pada tahun 2017 Kota Manado sudah menggunakan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar Rp. 2.650.000 lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar RP. 2.598.000 (Disnakertrans, 2018). Kabupaten Bolaang Mongondow selatan terendah perhitungan rata-rata tahun 2013 sampai 2017 dalam lapangan usaha sebesar 1.042.019, dikarenakan kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk lapangan usaha belum banyak karena termasuk daerah pemakaran baru. Dengan hal tersebut, bisa dilihat terdapat ketidakmerataan antar wilayah kabupaten/kota baik dalam perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 5. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Utara

No	Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1.	BolMong	3.705.389,50	3.911.543,38	4.139.675,10	4.413.657,90	4.708.657,86
2.	Minahasa	2.526.528,64	8.814.214	9.352.416,0	9.917.197,4	10.520.075
3.	Kpl.Sangihe	2.163.380,2	2.281.136,1	2.419.696,0	2.560.978,0	2.707.211,5
4.	Kpl. Talaud	1.191.788,3	1.253.574,6	1.318.988,2	1.388.781,5	1.459.705,2
5.	MinSel	4.287.793,60	4.574.871,20	4.858.985,50	5.109.523,9	5.446.042,5
6.	MinUt	6.319.110,5	6.791.468,4	7.272.904,3	7.782.483,3	7.292.477,4
7.	BolMut	1.170.345	1.253.606	1.320.468,1	1.401.607,2	1.489.830,2
8.	Kpl SiTaRo	1.062.683	1.143.055	1.223.203	1.309.019	1.400.572
9.	MiTra	2.527.706,0	2.693.784,4	2.693.748,4	3.044.812,2	3.238.768,7
10.	BolSel	913.130	981.754	1.039.767,6	1.103.234,8	1.172.208,6
11.	BolTim	1.341.909,5	1.435.563,5	1.528.600,1	1.613.812,0	1.706.060,3
12.	Manado	17.419.698,0	18.584.851,8	19.773.191,56	21.194.727,1	22.624.737,19
13.	Bitung	8.229.152,25	8.755.304,69	9.064.842,85	9.537.844,85	10.128.304,46
14.	Tomohon	2.186.140,33	2.322.072,70	2.464.338,04	2.566.700,00	2.793.743,92
15.	Kotamobagu	1.632.889,1	1.742.093,2	1.855.276,1	1.979.073	2.113.465

Sumber: BPS SULUT Statistik Dalam Angka Tahun 2018

Dengan terpusatnya investasi di suatu wilayah, maka terjadi ketimpangan distribusi investasi dalam negeri dan investasi asing yang dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan/pertumbuhan ekonomi. Investasi baik berupa penanaman modal asing maupun dalam negeri dapat berdampak pada kemampuan suatu wilayah untuk melakukan pembangunan. Investasi ini sangat diperlukan oleh wilayah untuk memperbaiki keadaan wilayahnya seperti memperbaiki infrastruktur, meningkatkan fasilitas publik dan lainnya. Investasi juga dapat menjadi penggerak bagi perekonomian wilayah, oleh karena itu perbedaan jumlah investasi ini juga dapat menyebabkan perbedaan performa ekonomi wilayah.

Pemerintah Kota Bitung memfokuskan untuk Sektor Industri kelapa dan perikanan karena mampu mendatangkan banyak keuntungan dalam segi ekonomi dan sosial budaya sebab mampu menciptakan investasi, meningkatkan pendapatan masyarakat, kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kota Bitung melihat Penanaman Modal Asing (PMA) atau Foreign Direct Investment (FDI) lebih banyak mempunyai kelebihan. Selain sifatnya yang permanen/jangka panjang, penanaman modal asing memberi andil dalam teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru.

Kabupaten Bolaang Mongondow yang paling banyak dilirik investor untuk menanamkan modalnya. Sebanyak 52 proyek investasi sementara dikerjakan di Bumi Totabuan. Sedikitnya Rp 1.4 Triliun dana diberikan. Di Bolmong salah satunya itu PT Conch membangun pabrik semen, itu masuk sektor non logam, mereka menambang batu gamping bahan baku semen. Untuk pertambangan emas ada J-Resources dan PT MSM. Sementara itu, untuk sektor yang paling diminati yakni industri makanan, mencapai 54 proyek. Tabel 6 terlihat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kota Tomohon dan Kota Kotamobagu tidak ada data investasi, ini disebabkan oleh perusahaan-perusahaan ketiga kabupaten tidak melaporkan atau tidak ada penambahan investasi yang

diterima baik alokasi investasi dalam negeri maupun luar negeri pada tahun 2013 sampai 2017 (Dinas Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara, 2019).

Sumberdaya manusia sangat penting bagi suatu wilayah. Namun tanpa kualitas yang memadai sumberdaya manusia ini kurang dapat berperan optimal dalam kemajuan wilayah. Perbedaan kualitas sumberdaya manusia yang dimaksud adalah tingkat pendidikan masyarakat, serta tingkat pendidikan pekerja. Tingkat pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dan nilai jual masyarakat itu sendiri. Pekerja dengan tingkat pendidikan rendah dan kemampuan rendah akan sulit mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang baik.

Jumlah penduduk yang mempunyai pendidikan tertinggi adalah kota Manado dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kota Manado adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara, dimana terdapat kantor-kantor pemerintah maupun swasta yang memerlukan sumber daya manusia berpendidikan untuk mengelola usaha-usaha pemerintahan maupun swasta. Jumlah penduduk yang mempunyai pendidikan terendah adalah Kabupaten Bolaang Timur, dimana masyarakat di daerah tersebut lebih memilih bekerja sebagai petani atau nelayan dibandingkan bersekolah. Oleh karena itu, produktifitas pekerja di wilayah ini tergolong rendah dan penduduk belum bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk lainnya. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut.

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi, seperti tenaga kerja dan kapital merupakan penyebab terjadinya ketimpangan regional. Pada dasarnya penduduk dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja adalah mereka yang seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja, termasuk mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang

Tabel 6. Alokasi Investasi Dalam Negeri Dan Luar Negeri Di Provinsi Sulawesi Utara

No.	Kab./Kota	2013		2014		2015		2016		2017	
		LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN
1	Bolaang Mon-gondow	10,155.5	11,128.2	165,088.95	489,368.80	164,831.25	1,090	1,322,798.33	1,604,220.80	2,322,404.25	1,198,856.50
2	Minahasa	1,218.4	-	294,954.88	63,922.50	453	2,500	55,404.27	3,300,000.00	333,481.22	2,892.80
3	Kepulauan Sangihe	-	-	-	-	-	-	-	-	198.94	-
4	Kepulauan Talaud	0	-	-	-	-	-	238,469.64	-	25.37	-
5	Minahasa Selatan	0	-	53,928.94	-	482,936.70	1,099	2,742,377.56	87,871.90	86,007.56	-
6	Minahasa Utara	937.5	2,279.3	1,445,799.28	103,325.70	374,676.55	1,342	429,019.45	12,768.30	2,262,482.83	31,584.40
7	BolMong Utara	162.1	-	13,536.77	-	7,130	2,010	10,539.63	-	2,391.25	-
8	Kepulauan SiTaRo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Minahasa Tenggara	13.2	-	27,907.16	-	3,667.50	1,130	8,247.69	-	11,209.90	-
10	BolMong Selatan	-	-	-	-	16.25	-	1,074.77	-	5.34	-
11	BolMong Timur	-	-	17,277.30	-	0	-	4,924.79	-	19,328.94	-
12	Manado	13,644.1	0	84,466.58	-	15,628.50	3,450	169,489.72	52,364.10	288,688.34	169,154.60
13	Bitung	39,575.5	53,351.8	2,571,633.71	41,382.30	275,884.35	1,117	258,787.65	12,354.20	1,121,542.90	85,685.00
14	Tomohon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kotamobagu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara 2018



mencari pekerjaan/ mengharapkan pekerjaan. Penduduk 15 tahun keatas yang bukan angkatan kerja adalah mereka yang selama seminggu yang lalu bersekolah, mengurus rumahtangga dan kegiatan lainnya.

Jumlah penduduk terbanyak tahun 2013 yaitu Kota Manado dengan angka 420.401 jiwa dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan angka 60.220 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak tahun 2014 yaitu Kota Manado dengan angka 423.257 jiwa dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan angka 61.177 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak tahun 2015 yaitu Kota Manado dengan angka 425.634 jiwa dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan angka 62.222 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak tahun 2016 yaitu Kota Manado dengan angka 427.906 jiwa dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow selatan dengan angka 63.207 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak tahun 2017 yaitu Kota angka 430.133 jiwa dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan angka 64.171 jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota pada tahun 2013 angka yang tertinggi adalah Kota Kotamobagu dengan nilai 2,14 persen, sedangkan angka 0,02 persen merupakan laju pertumbuhan penduduk terendah yang diperoleh Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tahun 2014 angka 2,38 persen merupakan yang tertinggi diperoleh Kabupaten Kepulauan Sangihe, sedangkan angka 0,54 persen merupakan laju pertumbuhan penduduk terendah yang diperoleh Kabupaten Kepulauan Talaud. Tahun 2015 angka 2,06 persen merupakan yang tertinggi diperoleh Kota Kotamobagu, sedangkan angka 0,37 persen merupakan laju pertumbuhan penduduk terendah yang diperoleh Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Tahun 2016 angka 2,06 persen merupakan yang tertinggi diperoleh Kota Kotamobagu, sedangkan angka 0,07 persen merupakan laju pertumbuhan penduduk terendah yang diperoleh Kabupaten Minahasa Selatan. Tahun 2017 angka 2,06 persen merupakan yang tertinggi diperoleh Kota Kotamobagu, se-

dangkan angka 0,22 persen merupakan laju pertumbuhan penduduk terendah yang diperoleh Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Kesehatan merupakan salah satu inventasi, dengan kesehatan yang baik, produktifitas kerja dapat meningkat. Masyarakat dapat melakukan usaha-usaha untuk menyejahterakan kehidupannya. Perbedaan taraf/ tingkat kesehatan yang dimaksud adalah tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Banyaknya fasilitas kesehatan dan tenaga medis akan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, sehingga tingkat kesehatan masyarakat akan meningkat. Kota Manado merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, oleh karena itu, banyak bangunan pemerintah dibangun untuk dipergunakan bagi kepentingan masyarakat yang ada. Salah satunya adalah bangunan fasilitasi kesehatan yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, posyandu dan tempat-tempat kesehatan lainnya. Angka yang paling rendah untuk tenaga kesehatan adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan jumlah rata-rata 116,6 orang, dimana tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kebanyakan berasal dari kabupaten/kota lain yang ada di provinsi Sulawesi Utara.

Kurang lancarnya perdagangan antar daerah juga merupakan unsur yang turut menciptakan ketimpangan wilayah. Ketidaklancaran tersebut disebabkan terutama oleh keterbatasan transportasi antara lain angkutan daratan, lautan dan udara. Jumlah kendaraan bermotor terbanyak dengan jumlah rata-rata 66.468,6 adalah Kota Manado. Ini disebabkan karena selain sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara Manado adalah kabupaten/kota terpadat penduduknya. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah yang tersedikit jumlah kendaraannya. Selain sebagai kabupaten/kota yang dimekarkan dari kabupaten kepulauan Sangihe, letaknya juga berada dipulau serta jumlah penduduknya kedua tersedikit jumlahnya untuk kabupaten/kota yang ada di provinsi Sulawesi Utara.

Transportasi laut di Sulawesi Utara, hanya ada di Kota Bitung, Kota Manado, Tahuna, Lirung dan Ulu Siau. Ini juga termasuk

salah satu yang mengakibatkan akses transportasi laut ke wilayah yang tidak memiliki transportasi laut menjadi terhambat di bandingkan dengan wilayah-wilayah yang memiliki transportasi laut.

Begitupun dengan transportasi udara, yang hanya ada Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kota Manado, ini juga bisa menimbulkan terhambatnya akses barang, jasa dan hal lainnya dengan wilayah yang tidak memiliki akses transportasi udara.

### Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketimpangan wilayah Kabupaten atau Kota di Provinsi Sulawesi Utara terjadi akibat ketidakmerataan investasi dan pembangunan yang dilaksanakan.

### Saran

Disarankan setiap Kabupaten atau kota agar saling memberikan masukan dan memberikan contoh pada kabupaten/kota lainnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adrei, A., and Liliana C., 2014. Inequality and economic growth: theoretical and operational approach. *Theoretical and Applied Economic*.
- Bitung Dalam Angka 2017. Produk Demostik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan di Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara 2013-2017.
- Bolaang Mongondow Dalam Angka 2017. Produk Demostik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan di Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara 2013-2017.
- Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka 2017. Produk Demostik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan di Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara 2013-2017.
- Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka 2017. Produk Demostik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan di Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara 2013-2017.
- Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka 2017. Produk Demostik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan di Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara 2013-2017.
- Dinas Penanaman Modal Sulawesi Utara., 2013-2017. Investasi Luar Negeri dan Dalam Negeri Kabupaten Kota Sulawesi Utara. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara., 2018. Upah Maksimum Kota (UMK) dan Upah Maksimum Provinsi (UMP). Provinsi Sulawesi Utara.
- Hartono, J., 2008 “Teori Portofolio Dan Analisis Investasi”.BPFE ,Yogyakarta. 2008
- Kotamobagu Dalam Angka 2017. Produk Demostik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan di Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara 2013-2017.
- Manado Dalam Angka 2017. Produk Demostik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan di Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara 2013-2017.
- Minahasa Dalam Angka 2017. Produk Demostik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan di Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara 2013-2017.
- Minahasa Selatan Dalam Angka 2017. Produk Demostik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan di Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara 2013-2017.
- Minahasa Utara Dalam Angka 2017. Produk Demostik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan di Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara 2013-2017.
- Minahasa Tenggara Dalam Angka 2017. Produk Demostik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan di Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara 2013-2017.

Sjafrizal, 2008. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Baduose Media, Cetakan Pertama. Padang.

Siau Tagulandang Biaro Dalam Angka 2017. Produk Demostik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan di Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara 2013-2017.

Talaud Dalam Angka 2017. Produk Demostik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan di Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara 2013-2017.